

Sistem Tanam Paksa di Indonesia : Tujuan dan Dampaknya

‘Aisyah Khairunnisa’ XI MPLB 3/01

Pendahuluan

Sistem tanam paksa atau *cultuurstelsel* pertama kali terjadi di Jawa, Indonesia oleh Johannes Van Den Bosch pada tahun 1830, yang menjabat sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda. Peristiwa adanya sistem tanam paksa dilatarbelakangi oleh adanya kesulitan mengenai keuangan akibat perang yang dilaksanakan di Jawa tahun 1825-1830 dan juga Belanda yang melawan Belgia di Belanda pada tahun 1830-1831. Akibatnya pada tahun 1830-1870 Belanda membebani masyarakat Indonesia dengan berbagai pajak hasil pertanian milik masyarakat seperti penduduk desa yang tidak memiliki lahan tanah wajib bekerja selama 75 hari dalam setahun di kebun-kebun milik pemerintah yang mana nantinya kewajiban tersebut akan menjadi semacam pajak menguntungkan bagi pemerintah Hindia Belanda dan mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami tanaman komoditi ekspor (kopi, tarum, dan tebu) yang nantinya wajib menyerahkan seluruh hasil tanaman dagangan kepada pihak pemerintah Hindia Belanda.

Awalnya sistem tanam paksa atau *cultuurstelsel* ini sangat menguntungkan pihak Hindia Belanda hingga Johannes Van Den Bosch mendapatkan gelar *Graaf*, yaitu gelar yang diberikan oleh Belanda pada 25 Desember 1839 sebagai bentuk apresiasi karena ia telah memakmurkan dan mensejahterakan negara Belanda dengan sistem tanam paksa di Indonesia yang telah dicetuskannya itu, khususnya pulau Jawa. Akan tetapi setelah berjalan secara berangsur-angsur, banyak masyarakat penduduk Indonesia yang mengalami kelaparan, kemiskinan, dan penderitaan di banyak daerah. Hingga akhirnya ada satu tokoh yang menyuarakan pendapatnya untuk menentang sistem tanam paksa di Indonesia, yaitu Eduard Douwes Dekker melalui tulisan Max Havelaar dengan menggunakan nama samarannya “Multatuli”. Dalam tulisannya Eduard Douwes Dekker menyampaikan kecamannya terhadap pemerintah Hindia Belanda atas penderitaan

yang dialami masyarakat penduduk Indonesia akibat dari diberlakukannya sistem tanam paksa tersebut. Aksi penentangan tersebut juga didukung oleh tokoh lain diantaranya, Baron Van Hoevell dan Fransen Van De Putte hingga akhirnya pemberlakuan sistem tanam paksa tersebut perlahan dihapuskan. Penghapusan sistem tanam paksa dilakukan secara bertahap pada tahun 1862 hingga tahun 1917 dengan pemberhentian penanaman terhadap jenis tanaman tertentu.

Isi

Pada saat terjadinya sistem tanam paksa atau *cultuurstelsel* tentu ada tujuan dari pihak Belanda tersendiri yang tentunya sudah direncanakan agar dapat menguntungkan pihak negaranya sendiri. Tujuan utama dari Johannes Van Den Bosch melakukan sistem tanam paksa adalah untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya guna menutupi krisis keuangan yang dihadapinya. Adapun tujuan lain dari diadakannya sistem tanam paksa tersebut, yang pertama ialah untuk menutupi kas negara yang kosong akibat peperangan di Jawa sehingga mengakibatkan banyaknya pengeluaran saat terjadinya perang diantaranya, biaya yang harus dikeluarkan saat peperangan dengan Perancis.. Kedua, guna pengumpulan pendapatan untuk negara Belanda sendiri yang mana nantinya dapat mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat Belanda. Ketiga, untuk penyuntikan dana peperangan yang diadakan di Eropa dan di Indonesia contohnya seperti pendanaan untuk perang Diponegoro. Keempat ialah guna membantu menyediakan dana untuk membayar hutang akibat peperangan salah satunya membayar utang-utang VOC yang pengeluarannya melonjak karena biaya operasional yang cukup tinggi.

Tentunya selain tujuan tersebut ada pihak yang terkena dampak dari dicetuskannya sistem tanam paksa atau *cultuurstelsel ini*, banyak masyarakat penduduk Indonesia yang dirugikan akibat aksi tersebut. Penghambatan penanaman tanaman padi menjadi akibat dari diberlakukannya sistem tersebut, karena waktu untuk budidaya tanaman perdagangan ekspor bersamaan dengan persiapan lahan padi. Ada Pula dampak lain yaitu butuhnya banyak air untuk penggarapan tanaman ekspor seperti tebu, sehingga memberatkan petani karena

membutuhkan air lebih banyak dari biasanya. Dampak lain juga ada pada tingginya tingkat kelaparan dan wabah penyakit sehingga angka kematian meningkat secara tajam, hal ini dapat terjadi karena para petani yang seharusnya fokus menanam jenis tanaman untuk keperluan makanannya sendiri alih-alih mereka menjadi fokus menanam tanaman ekspor yang nantinya akan diserahkan ke pemerintah Hindia Belanda dan juga ketidakstabilan yang terjadi terhadap pasokan pangan. Adanya sistem tanam paksa ini juga melipat gandakan kebutuhan akan hewan ternak petani, karena hewan gerak ini nantinya akan dipekerjakan di ladang guna mengolah tanah dan juga sebagai transportasi alat angkut hasil pertanian dari ladang menuju pelabuhan ataupun pabrik.

Selain dampak negatif, ada pula beberapa dampak positif yang dapat diperhatikan. Adanya pengetahuan baru bagi para petani mengenai teknik menanam dan jenis tanaman ekspor yang nantinya dapat dijadikan inovasi dalam penanaman tanaman pangan juga termasuk kedalam dampak positif dari aksi sistem tanam paksa tersebut. Dengan masuknya alat perkebunan dari Barat juga dapat menguntungkan bagi petani, karena dengan adanya alat tersebut petani dapat menguasai teknologi budidaya terhadap tanaman-tanaman baru. Masyarakat yang mengenal sistem perkebunan secara komersial setelah sebelumnya mengenal menanam dan menjual hasil tanam secara konvensional. Tak hanya itu, penyempurnaan fasilitas seperti adanya jembatan, pembangunan jalan, dan penyempurnaan pabrik, pelabuhan, dan gudang juga berpengaruh baik terhadap kelancaran akses masyarakat penduduk untuk melakukan kegiatan sehari-hari ataupun bekerja. Meningkatnya jumlah peredaran uang yang ada di desa, dengan adanya peningkatan tersebut dapat memunculkan rangsangan akan tumbuhnya perdagangan bagi masyarakat penduduk.

Penutup

Adanya pencetusan sistem tanam paksa atau *cultuurstelsel* ini adalah untuk menutupi krisis keuangan ekonomi yang dialami Belanda oleh Johannes Van Den Bosch dengan berbagai macam aturan yang diberlakukan diantaranya penduduk desa yang harus menyerahkan sebagian (20%) tanahnya untuk ditanami

komoditas ekspor, tanaman yang ditanam harus sesuai dengan perintah yang telah ditentukan oleh pemerintah Hindia Belanda, hasil tanam yang wajib diserahkan pada pemerintah Hindia Belanda, dan kerugian akan gagal panen yang ditanggung oleh petani. Tujuannya untuk membantu kas negara yang kosong hingga pendanaan untuk perang-perang yang terjadi di Indonesia dan Eropa.

Dari aturan-aturan yang diberlakukan dan tujuan yang telah direncanakan pastinya ada dampak-dampak yang dapat merugikan maupun menguntungkan bagi kedua belah pihak antara pihak Belanda maupun pihak masyarakat penduduk pedesaan Indonesia. Dampak negatif terburuk yang dialami oleh petani masyarakat penduduk pedesaan ialah tingginya angka kematian akibat meningkatnya angka kelaparan dan wabah penyakit efek dari pekerjaan petani yang cukup berat dan juga ketidakstabilan pasokan pangan. Dampak positifnya yaitu masyarakat atau petani pedesaan mendapat dan mengenal pengetahuan baru akan jenis-jenis tanaman, teknik penanaman dan budidaya, penggunaan alat perkebunan sehingga dapat menguasai teknologi budidaya terhadap tanaman-tanaman baru.

Eduard Douwes Dekker mendengar dampak-dampak yang terjadi akibat *cultuurstelsel* tersebut hingga akhirnya ia mengemukakan pendapatnya bahwasannya menentang sistem tanam paksa diberlakukan di Indonesia melalui tulisannya, Max Havelaar dengan menggunakan nama samarannya "Multatuli". Rupanya aksi pertentangan tersebut juga didukung oleh Baron Van Hoevell dan Fransen Van De Putte sehingga akhirnya sistem tanam paksa dihapus secara bertahap pada tahun 1862 hingga tahun 1917.

Daftar Pustaka

- Gischa, S. (2022). Dampak Tanam Paksa bagi Rakyat Indonesia. *Kompas.com*, <https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/10/130000779/penghapusan-sistem-tanam-paksa#page2>.
- Gischa, S. (2022). Sistem Tanam Paksa : Latar Belakang, Aturan, dan Penyimpangannya. *Kompas.com*, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/08/133000969/sistem-tanam-paksa-latar-belakang-aturan-dan-penyimpangannya>.
- Kurniawan, M. A. (2023). Sistem Tanam Paksa : Dampak Positif dan Negatif Bagi Rakyat Indonesia. *Tribunnews.com*, <https://www.tribunnews.com/pendidikan/2023/05/14/sistem-tanam-paksa-dampak-positif-dan-negatif-bagi-rakyat-indonesia>.
- Nailufar, W. L. (2021). Penghapusan Sistem Paksa. *Kompas.com*, <https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/10/130000779/penghapusan-sistem-tanam-paksa#page2>.
- Pangesti, R. (2022). Akibat Sistem Tanam Paksa Bagi Rakyat Indonesia. *detikedu*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5907987/akibat-sistem-tanam-paksa-bagi-rakyat-indonesia>.
- Rosari, N. A. (2023). Dampak Tanam Paksa Penjajah Belanda Bagi Indonesia. *detikedu*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6965452/dampak-tanam-paksa-penjajah-belanda-bagi-indonesia>.
- Salim, M. P. (2022). Cultuurstelsel Adalah Tanam Paksa, Ini Tujuan dan Dampaknya bagi Petani Pribumi. *Liputan 6*, <https://www.liputan6.com/hot/read/5119864/cultuurstelsel-adalah-tanam-paksa-ini-tujuan-dan-dampaknya-bagi-petani-pribumi>.
- Sarkowi, A. S. (2020). PENGARUH POLITIK CULTUURSTELSEL TERHADAP PERKEMBANGAN. *Jurnal Swadesi*, 14, 22.
- Setyaningrum, P. (2022). Sistem Tanam Paksa : Wilayah, Tujuan, Aturan dan Dampak Cultuurstelsel. *Kompas.com*, <https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/10/130000779/penghapusan-sistem-tanam-paksa#page2>.
- Sondarika, W. (2019). Dampak Cultuurstelsel (Tanam Paksa) Bagi Masyarakat Indonesia dari Tahun 1830-1870. *Jurnal Artefak*, 59-60.

Zulfahmi, N. (2024). Faktor Penyebab Belanda Menerapkan Sistem Tanam Paksa di Indonesia. *detikedu*,
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7360013/faktor-penyebab-belanda-menerapkan-sistem-tanam-paksa-di-indonesia>.